

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem pengelolaan pemerintah pada awalnya menggunakan sistem sentralisasi namun sekarang menjadi desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hal ini ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya yang konkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah menyusun Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238).

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh perusahaan saja, melainkan setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Jika di dalam perusahaan menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, lain halnya di pemerintahan yang menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai pedomannya. Pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah sebagai cermin untuk melihat kondisi keuangan pemerintah seperti pada neraca yang digunakan untuk melihat apa yang ada di pemerintah daerah, terutama menyangkut hal-hal yang salah urus atau hal-hal yang tidak diurus maupun yang belum diurus, kemudian pentingnya kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah juga karena laporan keuangan yang berkualitas artinya dapat dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan merupakan gambaran adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, akuntabilitas adalah amanah berarti pemangku kekuasaan adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan kepadanya.

Hal yang menjadi dasar dan acuan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu peraturan yang telah dibuat dan di sahkan dalam undang-undang yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman, sehingga faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain standar akuntansi pemerintahan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah peraturan telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 283 Tahun 2011.

- a. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- b. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2011).

Dari undang-undang di atas dapat kita ketahui bahwa keberadaan sebuah sistem akuntansi keuangan daerah memiliki fungsi yang penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan Jika sebuah sistem tersebut belum bisa dipahami serta penerapannya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka artinya belum bisa menyusun laporan keuangan pemerintahan dengan baik.

Sedangkan kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang tidak kalah penting terhadap sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logiks pada akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang di tetapkan pemerintah (Rahayu, 2014)

Fenomena yang terjadi yang ada pada pemerintah daerah adalah ketika sebuah pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun kepala daerahnya justru terjerat kasus korupsi di KPK contoh pada pemerintah daerah provinsi Riau, Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mendapat opini WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut. Tercatat Pemprov Riau mendapat opini WTP sejak tahun 2012. Namun meski empat kali mendapat opini WTP, kepala daerah Riau justru paling sering berurusan dengan KPK. Tiga kali berturut-turut Gubernur Riau jadi tersangka kasus korupsi di KPK. Dan masih banyak pemerintah daerah lainnya yang tercatat mendapat opini WTP dari BPK namun kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi seperti Kota Palembang, Kota Tegal, dan Kabupaten Bangkalan.

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah perolehan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

- a. Adanya kelemahan sistem pengendalian internal;
- b. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib;
- c. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- e. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan;
- f. Kurang memadainya Kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan maka diharapkan semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan

dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya, namun apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan apakah SDM di pemerintah daerah berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembuatan laporan keuangan tersebut. Ide awal penelitian ini di angkat dari fenomena yang muncul di media dan di perkuat oleh para peneliti terdahulu tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka kita dapat merumuskan masalah yang terjadi yaitu apakah beberapa faktor di atas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- a. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan bukti empiris bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah tersebut.

- b. Untuk memberikan bukti empiris bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan tersebut
- c. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi.
- b. Bagi pihak Organisasi atau SKPD di beberapa Kabupaten di Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bahan pertimbangan berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.
- c. Bagi pihak lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah yang serupa.